

ABSTRAK

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada tanggal 27 Februari 2012 sudah sepatutnya untuk dijadikan acuan bagi setiap penegak hukum dalam menangani tindak pidana ringan khususnya terhadap tindak pidana pencurian, namun dalam prakteknya masih ditemukan adanya penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang tidak memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 khususnya terhadap nilai suatu barang yang dicuri oleh pelaku tindak pidana pencurian. Adapun permasalahan Apakah Perma No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan sudah efektif dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix ? Bagaimana kendala pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix ?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu bersumber dan studi kepustakaan serta studi lapangan, kemudian di susun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara deskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan.

Perma No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix adalah tidak berjalan efektif dapat dilihat dari kasus pencurian dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah lebih tepatnya menggunakan Pasal 364 KUHP jo Perma No. 2/2012 dan menggunakan sistem peradilan cepat sebagai pengecualian tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 dan 363 KUHP dan sebagai akibat hukum yang ditimbulkannya ialah penggunaan pasal yang tidak tepat dan proses persidangan di pengadilan yang menjadi lama dan hukuman penjara yang tidak memberi keadilan kepada pelakunya. Kendala pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix adalah Perma No. 02 Tahun 2012 tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, keterbatasan personil, anggaran, dan kemampuan penyidik Polres dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, telah terjadi citra yang kurang baik kepada Polres karena tidak dapat melakukan upaya paksa terhadap pelaku kejahatan, penyidik Satreskim Polres tidak mempunyai persepsi yang sama terhadap Perma No. 02 Tahun 2012 yang menjadikan penyidik ragu-ragu. Adapun upaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut yaitu melakukan peninjauan ulang kembali terhadap Perma No. 02 Tahun 2012 dan mengesahkan RUU KUHP/KUHAP yang baru, menambah personil, anggaran, dan peningkatan kemampuan Penyidik Polres, memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap RUU KUHP/KUHAP yang baru kepada masyarakat.

ABSTRACT

The issuance of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 on February 27, 2012 should be used as a reference for every law enforcer in dealing with minor crimes, especially against criminal acts of theft, but in practice there is still a legal application against theft that does not pay attention to the provisions in Supreme Court Regulation Number 2 of 2012, especially regarding the value of an item stolen by a criminal act of theft. As for the problem Is Perma No. 2 of 2012 regarding the adjustment of the limit for minor crimes has been effective in the Crime of Theft of One Wind Bike (Pancal) with the Phoenix Brand? What are the obstacles in implementing Perma No. 2 of 2012 in the Crime of Theft of One Phoenix Wind Bike (Pancal)?

The research method used is the normative juridical approach, which is to determine certain norm standards for a phenomenon by examining secondary data and discussing the Perma Number 2 of 2012 in the Crime of Theft of One Wind Bike (Pancal) with the Phoenix Brand. While the data analysis used qualitative juridical methods, namely sourced and literature study and field studies, then arranged systematically, after being analyzed it was presented descriptively. The research emphasizes more on secondary data analysis studies or literature studies supported by primary data, namely field studies.

Perma No. 2 of 2012 regarding the adjustment of the limit for minor crimes in the Crime of Theft of One Wind Bike (Pancal) with the Phoenix Brand is not effective, it can be seen from the case of theft under two million and five hundred thousand rupiah, more precisely using Article 364 of the Criminal Code jo Perma No. 2/2012 and using the rapid justice system as an exception to criminal offenses regulated in Articles 362 and 363 of the Criminal Code and as a result of the law it results in the use of inappropriate articles and prolonged court proceedings and imprisonment that does not give justice to the perpetrators. Obstacles in implementing Perma No. 2 of 2012 in the Crime of Theft of One Wind Bike (Pancal) with the Phoenix brand is Perma No. 02 of 2012 cannot be categorized as statutory regulation, limited personnel, budget, and the ability of Polres investigators to conduct investigations and investigations, there has been a bad image of the Police because they cannot force efforts against criminals, Satreskim Polres investigators have the same perception of the Perma No. 02 of 2012 which made investigators doubtful. As for efforts to resolve these obstacles, namely conducting a reconsideration of Perma No. 02 of 2012 and ratify the new Draft Criminal Code / Criminal Procedure Code, adding personnel, budget, and increasing the capacity of Police Investigators, providing counseling and socialization of the new Draft Criminal Code / Criminal Procedure Code to the public.